

**Studi Analisis Deskriptif Partisipasi Masyarakat  
dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi  
di Kecamatan Pedurungan Tahun 2013**

Oleh :

Marcelinus Mario Surya Utama

14010110130102

Pembimbing : Dr. Edi Santoso, SU dan Dra. Sulistiyowati, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

***ABSTRACT***

*Study of Descriptive Analysis of Society Participation in Planning Development  
Transportation Infrastructure at Pedurungan District, Semarang 2013*

*This research has aims to : 1) describe dan analyze succesfull  
stage of Semarang City Government in accomodating social needs  
or social aspiration in Pedurungan District, Semarang City  
supposed to be the participate planning development; 2) describe  
and analyze synchronization of social proposal with realization*

*construction of transportation infrastructure.*

*This research belongs to qualitative research aiming to describe in detail and deeply about society participation in development planning in Pedurungan District, Semarang City with some sample of area such as Plamongansari, Pedurungan Kidul, Tlogomulyo and Muktiharjokidul. Data collecting technique used in this research was structured interview and observation also document analyze. Data analysis consisting of data reduction, data display and data verification and conclusion drawing.*

*From the research result, it can be concluded that :*

- 1. Eventhough society attendance in some sampling area in high level but the society that being active still in low level;*
- 2. The consistency level between planning, budgeting, realitating also synnchronize between bottom up planning and top down planning not yet worked well.*
- 3. Management transfer to third partnership that pointed by District SKPD makes a lot of society felt upset with the result because they not involved by government and just could be a supervisor.*

*Therefore, it needs an optimization from government in participate development planning socialication to work well, an accomplishment in participative development planning, and an management transfer to society again.*

*Keywords : Society Participation, Planning Development, Transportation Infrastructure.*

## A.PENDAHULUAN

Desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya merupakan hal yang bila dapat dilaksanakan dengan baik, mampu menjadi paradigma baru terhadap birokrasi pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut, muncul sebagai wujud respon atas kebijakan pemerintah pusat pada era Orde Lama yang sangat *powerfowatiull*, sentralistik dan hanya berupa perintah yang harus dilaksanakan tanpa melihat keragaman lokal yang terjadi. Pemerintahan pada era orde lama membuat munculnya banyak birokrasi yang kurang efektif dan efisien, lamban serta kurang responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Di sisi lain hal ini menyebabkan pula mandulnya kreatifitas dan kemauan dari masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi lokal yang dimiliki, masyarakat cenderung berpangku tangan kepada pemerintah dan menyerahkan semua hal terkait pembangunan kepada pemerintah.

Analisis kebutuhan rakyat secara sistemik dapat dibangun melalui pelibatan rakyat. Namun sayangnya seringkali pemerintah tidak menghargai partisipasi masyarakat, dikarenakan lebih berorientasi pada kepentingan elit daripada aspirasi masyarakat. Padahal partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, yaitu bahwa langkah konkrit untuk mewujudkan visi misi kota Semarang salah satunya dilakukan dengan memprioritaskan program-program pembangunan yang diwujudkan dalam

“SAPTA PROGRAM” yang terdiri dari penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, rob dan banjir, pelayanan publik, tata ruang dan infastruktur, kesetaraan dan keadilan gender, pendidikan serta kesehatan.

Terlebih lagi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah mencanangkan bahwa tahun 2014 sebagai tahun infrastruktur. Beliau berani mengusulkan anggaran khusus hanya untuk pembangunan infrastruktur sebesar 1,7 miliar rupiah, walaupun pada akhirnya ketika ‘bola’ berada di tangan parlemen dalam hal ini DPRD, anggaran yang disetujui hanya sebesar 1,2 miliar.

Permasalahan tersebut tampak pada pemerintahan di kota Semarang. Sebagai salah satu contoh pembangunan yang cukup signifikan dilaksanakan di kota Semarang adalah pembangunan fly over Kalibanteng, namun sayang yang terjadi adalah dengan adanya *flyover* di daerah Kalibanteng malah menambah permasalahan baru lagi, yaitu titik kemacetan berpindah ke Krapyak dan Jrahah. Itu karena volume kendaraan yang melaju di wilayah itu sangat tinggi. Jika semua hasil perencanaan di implemmentasikan sesuai dengan apa yang telah dicanangkan, hal ini tetap tidak akan berlangsung lama.

Dari adanya latar belakang tersebut, muncul pertanyaan tentang “Bagaimana partisipasi masyarakat dilaksanakan terutama pada perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur transportasi di kota

Semarang? “.Apakah perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi di kota Semarang sudah dapat mengakomodir kebutuhan/aspirasi masyarakatnya?. Apakah usulan-usulan yang masuk pada pemerintah baik melalui forum resmi maupun non-resmi mampu menjadi hasil akhir yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Sehingga tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat keberhasilan pemerintah kota Semarang dalam mengakomodir kebutuhan/aspirasi masyarakat Semarang agar menjadi perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi yang partisipatif serta menganalisis hasil akhir sinkronisasi antara usulan-usulan masyarakat kota Semarang dengan hasil akhir perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi di kota Semarang.

Penelitian skripsi ini berupaya untuk mengkaji hubungan antara partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi. Untuk melakukan penelitian maka diperlukan pedoman dalam artian mempunyai teori yang cukup, antara lain partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan infrastruktur transportasi. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatory, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala yang telah terjadi dan menganalisis gejala tersebut melalui prosedur penelitian kualitatif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1 Identifikasi Kajian Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Pedurungan Tahun 2013-2014.**

Dari hasil temuan penelitian menyebutkan bahwa perencanaan, pembangunan melalui musrenbang di Kota Semarang sudah mempunyai alur yang baik, hal tersebut dikarenakan musrenbang sendiri diawali dari proses rembug RT, rembug RW, rembug kelurahan dan diangkat ke kecamatan.. Alur perencanaan dan perumusan perencanaan pembangunan pertama kali berasal dari warga di RT dan RW yang mengusulkan kegiatan pembangunan di lingkungan mereka kemudian selanjutnya berbagai usulan tadi akan diseleksi melalui asas prioritas dengan dibahas bersama dengan perangkat kelurahan maupun kecamatan secara musyawarah . Sedangkan asas prioritas sendiri dilakukan dengan scoring yang telah ditentukan oleh Bappeda Kota Semarang menggunakan Simperda. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kecamatan pedurungan menurun, antara lain seperti terdapat di kelurahan Plamongansari bahwa segala pengelolaan perawatan infrastruktur transportasi di wilayah mereka masih merupakan tanggung jawab pengembang Perumahan Plamongan Indah sehingga membuat minimnya partisipasi masyarakat di perumahan tersebut dalam menghadiri pelaksanaan musrenbang.

Kemudian banyak masyarakat yang mengeluh sering tidak mendapat prioritas untuk dibangun melalui musrenbang dan akhirnya lebih memilih melalui bantuan dana aspirasi dewan. Hal ini, bila dibiarkan akan menimbulkan permasalahan baru dalam partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan di kecamatan Pedurungan. Ditakutkan masyarakat akan terbiasa menggunakan dana aspirasi dewan dan enggan untuk mengikuti proses musrenbang dikarenakan harus melalui proses yang berbelit-belit dan lama, walaupun pada akhirnya masyarakat hanya dijadikan lumbung suara bagi para oknum anggota dewan karena seringkali pembangunan melalui dana aspirasi tanpa perencanaan matang yang melibatkan masyarakat dalam perencanaannya. Identifikasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi di Kecamatan Pedurungan tahun 2013-2014 diidentifikasi oleh penulis ke dalam bentuk matrik, tabel matrik dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1: Matrik Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Kecamatan Pedurungan Tahun 2013-2014

No.	Kriteria	Aspek	Deskripsi dan Analisis	Dampak yang terjadi	
				Negatif	Positif

1.	Tingkat Kehadiran Masyarakat	<p>Ketersediaan waktu masyarakat</p> <p>Tipologi tempat tinggal</p> <p>Adanya dana aspirasi dewan</p>	<p>- Masyarakat dengan tipe pekerja penglaju memiliki jam kerja hingga malam</p> <p>- Pengelolaan perawatan perumahan berada di tangan pengembang sedangkan warga di perkampungan harus swadaya dalam merawat lingkungan</p> <p>- Masyarakat lebih memilih jalur pembangunan yang lebih cepat dan tanpa proses yang berbelit</p>	<p>- Masyarakat tidak memiliki waktu untuk menghadiri musrenbang</p> <p>- Masyarakat yang tinggal di perumahan cenderung cuek</p> <p>- Masyarakat hanya menjadi lumbung suara oknum dewan saat pemilihan umum</p>	<p>Masyarakat perkampungan lebih akif</p> <p>Lingkungan mampu terbangun.</p>
2.	Tingkat Keaktifan	Tingkat pendidikan	Status pendidikan seseorang memiliki	Warga berpendidikan	Warga berpendidikan

Masyarakat	warga	<i>social value</i> di masyarakat	rendah cenderung minder untuk mengutarakan pemikirannya	tinggi cenderung apatis terhadap pembangunan lingkungannya
	Tingkat kebutuhan pembangunan (mendesak/ tidak)	Kebutuhan mendesak, biasanya dikarenakan bencana seperti banjir/ longsor	Ketika terjadi bencana, masyarakat berebut mengajukan usulan	Ketika suasana kondusif, warga akan apatis terhadap pelaksanaan musrenbang

Sumber: Data primer hasil wawancara dengan narasumber, 2014.

Beberapa isu yang muncul terkait dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yang pertama adalah mengenai tingkat kehadiran masyarakat dalam forum-forum musrenbang yang diadakan oleh pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan temuan penulis pada beberapa wilayah kelurahan sampel yang penulis teliti mulai dari kelurahan Plamongsari, Pedurangan Kidul, Tlogomulyo hingga Muktiharjokidul di kecamatan Pedurangan, seringkali didalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan terutama pada musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan (Musrenbangkel) hanya dihadiri oleh beberapa perwakilan RW atau RT saja,

hal ini mengindikasikan adanya ketidakpedulian masyarakat atas pembangunan wilayah mereka. Padahal dengan kehadiran masyarakat didalam forum Musrenbangkel tersebut, warga menjadi semakin tahu akan apa saja yang menjadi tujuan pembangunan di wilayah mereka, dengan cara apa pula tujuan pembangunan tersebut diraih, sehingga nantinya masyarakat mampu berpartisipasi bagi peningkatan pembangunan di wilayah mereka baik secara materi atau moril maupun dalam bentuk pengawasan pada saat realisasi pembangunannya kelak.

## **B.2 Identifikasi Kajian Mekanisme Proses Perencanaan Pembangunan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat**

Dari hasil temuan penelitian menyebutkan bahwa respon dari narasumber selaku stakeholders yang terlibat dalam mekanisme proses perencanaan pembangunan merasa cukup puas dan sangat terbantu, karena Pemkot Semarang dalam hal ini Bappeda Kota Semarang khususnya telah mengeluarkan sistem baru yang mampu mengatur usulan masyarakat secara online sehingga berbagai usulan masyarakat mampu tertampung dalam satu wadah yang transparan dan kredibel yaitu simperda. Simperda pula lah yang menjadi sarana bagi Bappeda dalam menentukan prioritas pembangunan dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dari dinas-dinas teknis seperti Dinas Perhubungan, Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP), Dinas PSDA, dan Dinas Bina Marga. Dalam mengawal konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan terjadi

pengawasan dari dua arah, baik oleh masyarakat maupun fasilitator dalam hal ini Bappeda

Alexander Abe dalam *Perencanaan Daerah Partisipatif* mengatakan bahwa suatu perencanaan tidak lain dari susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi dan faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu<sup>1</sup>. Pengertian ini memuat hal-hal prinsip dalam dokumen perencanaan, yaitu:

- (a) apa yang akan dilakukan, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi;
- (b) bagaimana mencapai hal tersebut;
- (c) siapa yang akan melakukan;
- (d) lokasi aktivitas;
- (e) kapan akan dilakukan, berapa lama; dan
- (f) sumberdaya yang dibutuhkan

Suatu perencanaan selain mengandung segi-segi umum baik dalam perihal tahap, metode dan teknisnya juga mengandung segi-segi khusus. yang dimaksudkan adalah bahwa suatu perencanaan tidak bisa dibuat dalam skema yang universal. Pengakuan adanya perencanaan daerah justru sebagai konsekuensi dari pengakuan adanya pluralitas dan keunikan suatu daerah. Namun demikian kita juga mengakui adanya segi-segi yang bersifat umum dari suatu daerah. Keunikan daerah tersebut

---

<sup>1</sup> Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: CV. Pembaruan Press. Hal 71

lebih menunjuk pada adanya kapasitas dan lingkup persoalan yang berbeda antar daerah.

Hal ini belum ditunjukkan dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dimana masih ada penyeragaman atau uniformitas terhadap wilayah kelurahan sampel penelitian. Masing-masing wilayah mendapat porsi “kue” yang sama, padahal disetiap wilayah tersebut memiliki perbedaan mencolok baik di cakupan luas wilayahnya, permasalahan yang sering dihadapi, tantangan pada beberapa tahun kedepan maupun jumlah penduduknya baik dalam status pekerjaan, kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda-beda pula, sehingga apabila dilihat dari penyeragaman pemberian anggaran dan perhatian kepada masing-masing kelurahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, prinsip dasar partisipasi masyarakat sebagai suatu hak demokrasi belum mampu terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan pemahaman baik pada diri masyarakat sendiri maupun pemerintah, masyarakat sendiri kurang memiliki kesadaran bahwa pembangunan di wilayah mereka juga merupakan tanggung jawab mereka sendiri tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah semata., selain mengusulkan masyarakat juga harus menentukan jenis pembangunan yang sekiranya dibutuhkan dan cocok untuk dibangun di wilayah mereka, namun ketika nanti telah dibangun masyarakat juga memiliki kewajiban ikut memelihara dan melestarikan hasil pembangunan tersebut. Bagi pihak pemerintah dalam hal ini aparatur pemerintah kelurahan maupun pemerintah kecamatan didalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang partisipatif harus ditimbulkan pemikiran bahwa suatu pembangunan tidak

akan berhasil jika tanpa adanya keterlibatan masyarakat sekitar yang lebih mengetahui seluk beluk wilayah mereka sendiri, dan pelibatan masyarakat sendiri hendaknya bersifat holistik atau menyeluruh, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi atas hasil pembangunan tersebut.

### **B.3 Identifikasi Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Realisasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Hasil Musrenbang**

Dari hasil temuan penelitian menyebutkan bahwa respon dari narasumber selaku masyarakat yang menerima hasil pembangunan dari musrenbang adalah cukup merasa kecewa, karena Pemkot Semarang telah menggunakan sistem rekanan dalam realisasi pembangunan infrastruktur transportasi, sedangkan masyarakat hanya diposisikan sebagai pengawas semata. Mekanisme baru dimana pembangunan hasil rumusan musrenbang dilakukan oleh rekanan atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh SKPD Kecamatan, menyebabkan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat secara riil. Adanya mekanisme baru tersebut, pelibatan masyarakat untuk berperan serta didalam pembangunan wilayahnya semakin minim dan dengan minimnya keterlibatan masyarakat mengakibatkan masyarakat menjadi kurang percaya pada proyek pembangunan padahal masyarakat lebih mengetahui seluk beluk wilayah tersebut. Pentingnya pelibatan semua

stakeholder sangatlah penting, selain terdapat transparansi proses dengan adanya keterbukaan dalam penunjukan rekanan sendiri. Mampu menimbulkan rasa percaya dari semua pemangku kepentingan terhadap rekanan yang dipilih.

Terlebih menurut analisis penulis bila pemerintah memberikan dana langsung kepada masyarakat, untuk dikelola sendiri melalui kepanitiaan yang dibentuk oleh masyarakat, hal tersebut akan mampu memberi stimulan atau pemicu bagi warga yang lain untuk ikut berkontribusi baik dana, tenaga maupun pemikiran ketimbang dilaksanakan oleh rekanan yang ditunjuk. Maka dengan adanya stimulan dari pemerintah masyarakat akan mencari cara untuk meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas jalan yang dipaving diwilayah mereka, para RT/RW akan mengumpulkan secara kolektif dana dari masing-masing warga sehingga nanti pembangunan yang dihasilkan pun bahkan mampu melebihi target yang telah direncanakan. Selain pelaksanaan pembangunan yang tidak memuaskan karena luasan volume yang berkurang dikarenakan terkena potongan baik karena pajak, biaya administrasi maupun biaya “*mafia proyek*”, permasalahan lain yang muncul adalah tidak turunnya anggaran dana dari musrenbang walaupun telah masuk dalam skala prioritas.

Penggunaan rekanan dalam realisasi pembangunan melalui musrenbang tersebut tentu saja menyebabkan peran masyarakat sedikit demi sedikit semakin diminimalisir. Dalam hal ini peran masyarakat hanya sekedar menghimpun dan mengusulkan serta mengawasi pelaksanaan

pembangunan di wilayah mereka. Ketidak efektifan realisasi pembangunan, tingkat ketepatan antara realisasi pembangunan dengan kebutuhan masyarakat yang rendah ditambah tidak munculnya rasa memiliki masyarakat pada pembangunan infrastruktur transportasi membuat layak bahwa penggunaan rekanan atau pihak ketiga dalam melaksanakan realisasi pembangunan untuk ditinjau ulang kembali. Berdasarkan pernyataan diatas menurut analisis penulis bahwa apa terjadi adalah timbulnya rasa kurang percaya dari pihak pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan bantuannya secara langsung. Ketidak percayaan pemerintah tadi diperhalus melalui regulasi yang dibuat dengan mengganti pemberian bantuan yang dulunya diberikan secara langsung diganti dengan pemberian melalui rekanan sehingga membuat partisipasi masyarakat semakin tereliminir.

## C. PENUTUP

### C.1 Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang masih cukup rendah. Tingkat kehadiran masyarakat cukup tinggi pada perencanaan pembangunan di 3 wilayah sampel penelitian penulis, kecuali kelurahan Muktiharjokidul. Masyarakat yang tidak hadir disebabkan tidak adanya ketersediaan waktu dikarenakan harus bekerja hingga larut malam., lingkungan yang sudah dikelola oleh pengembang salah satunya di Perumahan Plamongan Indah, kelurahan Plamongansari maupun dengan adanya aspirasi dewan membuat

masyarakat beranggapan bahwa perencanaan pembangunan melalui musrenbang merupakan sebuah proses yang panjang dan berbelit-belit sehingga membuat beberapa perwakilan warga cenderung beralih meminta bantuan dari dana aspirasi dewan ketimbang pengajuan usulan melalui musrenbang. Di tingkat musrenbang kelurahan, tingkat keaktifan masyarakat masih cukup rendah hal ini dikarenakan masyarakat cenderung aktif mengikuti jalannya musrenbang hanya ketika mereka membutuhkan bantuan yang disebabkan wilayah mereka terkena bencana seperti masyarakat di kelurahan Muktiharjokidul, namun seringkali masyarakat cenderung bersikap pasif atau apatis karena beberapa perwakilan masyarakat beranggapan mereka tidak memiliki bekal pendidikan yang cukup bila dibandingkan dengan perwakilan warga lainnya.

## C.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini kepada Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Bappeda Kota Semarang khususnya perlu mengkaji ulang pemberian pelaksanaan perencanaan pembangunan oleh pihak ketiga. Dengan sistem tersebut, mampu mengeliminasi keterlibatan partisipasi masyarakat secara esensial, terlebih partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan mutlak sifatnya dan memiliki peran yang cukup vital. Dikarenakan masyarakat akan lebih merasa memiliki (*sense of belonging*) dan menaruh kepercayaan lebih apabila pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku :

Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta :  
Pembaruan.

Abubakar, Iskandar dkk. 1996. *Manajemen Transportasi Perkotaan*  
(Prosiding Sarasehan MTI Desember)

Adi, Isbandi Rukminto. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat*  
*dan Intervensi Komunitas*. Jakarta:. Lembaga Penelitian FE-UI.

Budiharjo, Prof.Ir.Eko,Msc & Hardjohubojo, Ir.Sudanti,MS. 1993. *Kota*  
*Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Alumni

Bryant, Coralie. 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*.  
Jakarta : LP3ES. Diterjemahkan oleh Rusyanto L, Simatupang.

Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta :  
Gadjah Mada University Press.

Heryanto, Bambang. *Roh dan Citra Kota*. Surabaya : Brilian Internasional

Riyadi dkk. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT Gramedia Pustaka  
Utama: Jakarta.

Robinson, Tarigan. Drs, M.R .2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*.  
Jakarta: Bumi Aksara.

Soetrisno, Lukman. 2004. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta : Kanisius.

Soemarmo. 2005. *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang*. Tesis Magister Administrasi Publik, UNDIP. Semarang.

Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Manajemen Pembangunan*. Gunung Agung: Jakarta

**Internet :**

Eko Budiharjo, “Tata Ruang Perkotaan Dengan Pendekatan Aspek Masyarakat”,

<http://www.penataanruang.net/taru/sejarah/BAB%06.1%20footer.pdf>

diakses pada tanggal 20 Oktober 2012 pukul 18.15 WIB

Lanang Wibisono, “ Mencari Solusi Kemacetan di Semarang yang Kian Parah”,

<http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/05/03/223675>

diakses pada tanggal 30 Agustus 2012 pukul 17:49 WIB.

Redaktur Utama, “Rekayasa Lalu Lintas Tak Maksimal”,

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/08/30/12>

[8501/Mencari-Solusi-Kemacetan-di-Semarang-yang-Kian-Parah](#)

diakses pada 28 November 2013 pukul 22:14 WIB.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

[http://kawasan.bappenas.go.id/index.php?option=com\\_content&view=](http://kawasan.bappenas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=110)

[article&id=119&Itemid=110](http://kawasan.bappenas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=110) diakses pada hari Rabu, 18 Juni 2014

pukul 11:56

#### **Undang-undang :**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan  
Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 11 Ayat 2  
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang  
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Tata Cara  
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 tahun 2013 Tentang Pedoman  
Pelaksanaan Rembug Warga Dan Musrenbangkel Dan  
Musrenbangcam Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja  
Pembangunan Daerah Kota Semarang.

**Jurnal :**

Tanuwidjaja, Gunawan dan W, Joyce Martha. 2013. *Revitalisasi Kota Dan Kabupaten Yang Berkelanjutan : Kerangka Kerjasama Dan Perencanaan Partisipatif Di Bangkalan Madura*. Buletin Jendela Pembangunan Daerah “*Media Informasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah*” Edisi 6 Juni 2013.

Ma’rif, Samsul dkk. 2009. *Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Semarang*. Jurnal Riptek Volume 3 No. I Tahun 2009.